

OPINI

Mahasiswa Baru dan Politik Kota

SELEKSI Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) tahun 2015 yang merupakan hal penting seluruh perguruan tinggi negeri dihelat Selasa (9/6). Sejalan dengan daya tampung nasional yang meningkat hampir 8,9% dari tahun lalu, daya tampung PTN di Yogya juga meningkat.



HALILI
Koordinator LinK-DeHAM FIS UNY

Sebagai Kota Pendidikan, Yogya akan segera kedatangan warga baru dalam jumlah besar. Mengacu pada daya tampung enam PTN melalui SBMPTN saja, tiga puluh ribuan mahasiswa baru akan menyerbu daerah istimewa ini, belum lagi mahasiswa baru

antara lain, pertama, secara kultural urbanisasi calon-calon sivitas akademika tersebut akan terus menegaskan status dan posisi Yogya sebagai "kawah candradimuka" kaum terdidik di Indonesia.

Kedua, bagi pertumbuhan ekonomi, tentu ini memberikan

PTS. Dalam perspektif politik kota, situasi tersebut harus mendapat respons kebijakan yang memadai dari pemangku kebijakan, terutama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kota dan Kabupaten penyangganya.

Keberadaan mahasiswa baru dalam jumlah besar, tentu memberikan beberapa dampak positif,

kabar baik. Potensi konsumsi para warga kelas menengah akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) program kewirausahaan melalui perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta tentu akan menjadi insentif tambahan bagi perekonomian Yogya.

Namun demikian, kehadiran mahasiswa baru dalam jumlah besar itu tentu akan memunculkan masalah-masalah perkotaan baru (*urban issues*). Pertama, potensi ketegangan dan konflik sosial. Pemerintah daerah harus memiliki prakarsa yang memadai untuk meminimalisasi konflik sosial atau ketegangan komunal. Keberadaan kantong-kantong sosial berbasis daerah, suku, dan etnis, yang juga

■ Bersambung ke Hal 14

Mahasiswa Baru

beririsan dengan agama dan tradisi, berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan.

Secara faktual, pengalaman ketegangan sosial pasca "kasus premanisme" di LP Cebongan telah mendorong polarisasi "milisi-milisi" kedaerahan. Mahasiswa-mahasiswa berbasis daerah yang gagal menuntaskan studi secara optimal sesuai tujuan awal mereka ke Yogya, mulai banyak menimbulkan masalah sosial-keamanan baru.

Hal ini diwarnai dengan konteks industrial baru, dimana jasa keamanan merupakan komoditas yang sangat menjanjikan. Kalau pemerintah tidak merespons situasi

ini dengan kebijakan yang memadai, bukan tidak mungkin letupan-letupan premanisme dan konflik sosial berbasis kedaerahan akan marak, seperti yang kerap kali terjadi di Ibukota.

Kedua, segregasi sosial. Pemerintah daerah juga tidak bisa menutup mata atas kesenjangan sosial-ekonomi yang potensial muncul dari urbanisasi mahasiswa baru. Mahasiswa-mahasiswa yang menempuh studi di Yogyakarta sebagian besar berasal dan menampilkan perilaku kelas menengah yang berpotensi bergesekan dengan kearifan kultural dan pola kolektif perilaku

masyarakat lokal.

Ketiga, kemacetan kota. Kedatangan mahasiswa baru tentu akan menambah volume kendaraan di Jogja.

Keempat, potensi jaringan kriminalitas, khususnya narkoba. Sinyalemen bahwa kos-kosan dan asrama mahasiswa Yogya merupakan sarang narkoba sudah sangat benderang.

Dalam perspektif politik kota, pemerintah dan masyarakat sipil merupakan agen utama pembuatan keputusan bersama untuk kepentingan bersama kehidupan masyarakat kota. Kedatangan mahasiswa

baru tentu tidak bisa kita baca sebagai inti masalah yang muncul di kota. Masalah-masalah ekoran dari urbanisasi mahasiswa baru sesungguhnya hanyalah ujian bagi keseriusan kota dalam melaksanakan fungsi public service dan decision-making.

Di samping itu, partisipasi masyarakat sipil memainkan peran yang besar, terutama dalam pendidikan kewargaan untuk menjadikan mereka sebagai warga yang cerdas (*smart city*). Tanpa warga cerdas, kota akan berubah menjadi arena bagi bertakurnya hukum rimba: yang kuatlah yang menang! (*)

Sambungan Hal. 13